

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan keterangan ahli oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Jambi yaitu berguna untuk membuktikan pelaku termasuk sebagai pemakai atau pengedar dilihat dari kadar penyalahgunaan narkotikanya yang sulit dibuktikan dari sisi pengetahuan yuridis. Keterangan ahli ini sangat membantu mencari kebenaran fakta dan membuat terangnya jalan perkara di pengadilan. Dari keterangan ahli tersebut, akan menambah keyakinan hakim mengenai persoalan di bidang narkotika yang hanya bisa dijelaskan oleh seorang ahli yaitu sebagai dokter. Keterangan dokter tersebut dapat diberikan baik itu keterangan yang di ucapkan secara langsung di pengadilan ataupun dalam bentuk tulisan.
2. Kendala dalam penggunaan keterangan ahli oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Jambi yaitu saat keterangan ahli menyatakan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dan terdakwa harus direhabilitasi, hal tersebut menyulitkan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahguna nakotika. Karena tidak semua terdakwa dapat memberikan kepastian dimana dia akan menjalankan rehabilitasi dan terdakwa juga harus ada jaminan biaya untuk masuk rehabilitasi

tersebut. Kendala lainnya yaitu kadangkala adanya ketidaksesuaian antara keterangan saksi dan keterangan ahli, sehingga hakim lebih lanjut melihat kepada fakta di persidangan. Sulitnya mendatangkan saksi ahli juga menjadi kendala, dikarenakan uang untuk akomodasi cukup besar, sedangkan dana untuk pemanggilan saksi belum dianggarkan oleh pihak pemerintah.

B. Saran

1. Penegak hukum sebaiknya mengantisipasi keterangan ahli sebagai alat bukti yang akan semakin penting di masa mendatang, karena perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi jenis kejahatan yang semakin beraneka ragam. Antisipasi itu dapat dilakukan dengan cara memperjelas dan mempertegas peraturan mengenai keterangan ahli yang berlaku di kalangan penegak hukum. Peraturan tersebut terutama memuat siapa yang dapat ditunjuk sebagai ahli dan menyangkut standar mengenai tingkat pendidikan formal dan pengalaman. Peraturan tertulis yang jelas dan tegas dapat membantu penegak hukum lebih terarah dalam menangani perkara yang membutuhkan bantuan ahli.
2. Diharapkan pemerintah menganggarkan dana untuk keperluan akomodasi bagi saksi maupun ahli, sehingga dapat membantu bagi hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Kepada saksi maupun ahli, yang ditunjuk oleh aparat penegak hukum hendaknya bila tidak berhalangan tetap, hendaknya dapat hadir guna keterangan yang sangat diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya.